



## **DEMOKRATISASI DALAM POLITIK KEPARTAIAN ISLAM (Studi Komparatif PPP di Indonesia dan PAS di Malaysia)**

**Khoiro Ummatin**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[khaerulumam1704@gmail.com](mailto:khaerulumam1704@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tulisan ini merupakan hasil dari penelusuran literature yang membandingkan proses demokrasi pada dua partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Indonesia dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia. Studi ini menegaskan bahwa meskipun kedua partai Islam tersebut memiliki latarbelakang perjuangan yang sama, namun memiliki perbedaan dalam proses demokratisasi. Demikian pula, kedua partai selalu mengalami kendala dalam setiap pemilihan umum khususnya menyangkut kepercayaan publik terhadap kedua partai. PPP di Indonesia dalam perjalanannya tidak pernah memenangkan pemilihan umum, seperti halnya PAS di Malaysia. PAS di Malaysia merupakan partai oposisi melawan partai UMNO yang berbasis etnis (Melayu). Studi ini menyarankan pentingnya dilakukan studi lanjutan untuk melihat secara komprehensif mengenai kontribusi dan tantangan partai-partai Islam di Indonesia dan Malayasia sehingga ditemukan studi yang memiliki basis analisis yang lebih mendalam.

**Kata Kunci :** Partai Islam, Demokratisasi, Publik

### **ABSTRACT**

*This paper is the result of a literature search comparing the democracy process to two Islamic parties, the Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in Indonesia and the Partai Islam Se-Malaysia (PAS) in Malaysia. The study confirms that although both of these Islamic parties have a similar struggle, they have a difference in the process of democratization. Similarly, both parties are always experiencing obstacles in every general election in particular regarding the public trust of both parties. PPP in Indonesia on its way has not won the elections, like PAS in Malaysia. PAS in Malaysia is the opposition party against the UMNO party based ethnic (Malay). The study suggested the importance of advanced studies to see comprehensively on the*

*contributions and challenges of the Islamic parties in Indonesia and Malaysia so that studies have a deeper analysis base.*

**Keywords:** *Islamic Party, Democratization, Public*

## A. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan memaparkan kajian untuk memahami isu politik kepartaian di negara Malaysia dan Indonesia dari perspektif Islam. Untuk keperluan memahami situasi, peranan, orientasi dan maksud dari politik kepartaian ini dalam proses demokratisasi, sudah barang tentu semangatnya adalah membawa manfaat kepada kepentingan Islam, baik Islam sebagai agama maupun Islam sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menaungi pemeluknya. Paparan kesejarahan kepartaian Islam ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran terhadap partai politik Islam agar dapat memainkan peranan untuk saling menyempurnakan ke arah tatanan masyarakat demokratis, berkeadilan dan kesejahteraan di Indonesia dan Malaysia sebagai sebuah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Kepartaian yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah menyangkut partai politik Islam, maka dalam konteks ini penulis akan melakukan analisis kesejarahan atas partai politik Islam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Indonesia dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia dalam memberikan kontribusinya membangun demokrasi. Karena sistem kepartaian kata ujungnya adalah sebuah kekuasaan, tata kelola pemerintahan dan demokratisasi. Maka sudah sangat jelas, peluang sistem kepartaian mengisi ruang-ruang pada tata kelola pemerintahan yang demokratis. Walaupun ada sangkaan negatif atas keraguan terhadap proses Islamisasi bisa harmonis dengan demokratisasi, karena Islam berasal dari ajaran Tuhan sedang demokrasi berasal dari barat. Padahal realitasnya tidaklah demikian, dan justru Islam bisa mengadaptasi dan mengakulturasi terhadap realitas sosial dan politik.

Argumentasi yang dikemukakan untuk memilih kedua partai ini adalah PPP dan PAS adalah sama-sama menggunakan azas Islam dalam menjalankan politik kepartaiannya. Di luar azas itu, dari sisi empiris kesejarahan PPP dan PAS, kedua partai ini sama-sama memiliki keragaman secara ideologis tapi karena memiliki semangat yang sama, sehingga dari keragaman yang ada dapat dipersatukan dalam sebuah kepartaian. Meski demikian, kedua partai ini tentu memiliki sebuah perbedaan secara substantif sebagai pijakan filosofis untuk melakukan gerakan. Oleh karena kedua partai ini memiliki persamaan dan juga perbedaan, maka keberadaannya menjadi menarik untuk dilakukan analisis terutama ketika disandingkan dengan isu-isu demokratisasi. Kajian dari sisi kesejarahan ini ditemukan data, bahwa kedua partai Islam ini didirikan dengan semangat fusi dari beberapa partai politik. Beberapa partai politik yang dipayungi "Islam" ini, sangat logis kalau kemudian masing-masing memiliki perbedaan pandangan politik dan ideologi. Namun demikian mereka sama-sama bisa bersinergi dalam mengusung semangat kepartaian, karena adanya sebuah tujuan mulia yang sama-sama diperjuangkan, yaitu tegaknya syariat



Islam, terwujudnya demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan melahirnya kesejahteraan rakyat.

Dalam kasus kepartaian untuk PPP di Indonesia, fusi didasarkan pada sebuah regulasi pemerintah yang memaksa partai politik di Indonesia melakukan fusi, karena Indonesia melakukan pembatasan keberadaan partai yang terdiri dari Golkar, PPP dan PDI. Oleh karena itu, sejumlah partai politik Islam yang ada di Indonesia harus menyatukan visi dan misinya dalam sebuah partai politik yang kemudian diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Latar belakang fusi politik yang demikian, menjadikan kondisi politik di PPP menyimpan bara konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit untuk diurai, karena masing-masing elit politik di PPP memiliki akar ideologis yang berbeda-beda ditambah dengan adanya politik kepentingan yang dimiliki masing-masing elit. Keragaman ideologi ini di Indonesia pasca reformasi tahun 1988 membuka ventilasi politik dengan sistem multi partai, akibatnya banyak partai politik Islam bermunculan di Indonesia. Lahirnya partai politik Islam baru tersebut, tidak menggoyahkan keberadaan PPP di Indonesia dalam menegakkan jati diri sebagai partai Islam. Lain halnya dengan partai Islam Se-Malaysia (PAS), bahwa PAS di Malaysia lahir dari sebuah semangat kebersamaan para elit politik muslim yang memfusikan diri mereka untuk menyatu melawan penjajah Inggris dengan sebuah bendera kebesaran Islam untuk sebuah kemajuan negara dan kerajaan Malaysia. Perbedaan tersebut disatukan bukan atas paksaan, melainkan sebuah kemauan dan cita-cita bersama, meski keduanya sama-sama menyimpan bara konflik yang tidak bisa dihindarkan. Paparan singkat keberadaan dua partai Islam PPP di Indonesia dan PAS di Malaysia dalam proses demokratisasi ini menjadi pokok kajian dalam tulisan ini.

Dalam sejarahnya demokrasi dapat dilacak sejak masa Yunani Kuno yang berarti pemerintahan oleh banyak orang yang dalam kacamata pemikir Yunani Kuno seperti Aristoteles, demokrasi memiliki makna negartif karena mengandung kemungkinan bahwa pemerintahan akan dikendalikan oleh orang-orang yang miskin dan tidak terdidik (Badri, 2019). Namun pada dua dasawarsa terakhir, istilah demokrasi sebagai suatu sistem politik telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara didunia (Nugroho, 2015). Sementara itu, sebagai sebuah konsep demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Terdapat tiga dimensi demokrasi yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan disuatu negara (Nugroho, 2015). Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang dengan pengertian, orang akan melahirkan aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka (Cora Elly Novianti, 2013).

Partai politik Islam adalah partai yang bertumpu pada ideologi Islam sebagai azaz partai yang memiliki orientasi, nilai dan cita-cita dalam menjalankan fungsinya dalam sistem kenegaraan yang berdasar pada etika politik dalam Islam atau sejalan dengan syariat Islam dimana salah satu bentuk legitimasi yang membuktikan bahwa partai tersebut merupakan partai Islam

adalah dengan melihat aturan partai atau Anggaran Dasar Partai (Tanjung, 2019). Partai politik islam berjalan di bawah kerangka kerja demokratis yang menjawab pertanyaan tentang alasan ada tidaknya demokrasi di negara-negara Muslim (Hadiz, 2011: 2). Secara kasat mata, jelas bahwa partai-partai politik Islam mengandalkan simbolisasi Islam dalam menggalang pemilih yang didasarkan atas hubungan emosional keagamaan tersebut. Pada titik ini, terlihat bahwa para elit politiknya mencoba menghidupkan sentimen identitas keagamaan masing-masing sebagai penegasan politik identitas yang melekat pada diri mereka (Mayrudin & M. Chairil Akbar, 2019). Menurut Bezhan (2017) tujuan pembentukan partai politik islam tidak hanya untuk menyebarkan ide-ide mereka, tetapi juga untuk bersaing dengan partai politik demokratis nasionalis.

Tulisan ini dibangun dari analisis perbandingan mengenai partai Islam di Indonesia dan Malaysia. Keberadaan partia Islam pada dua negara Muslim mengalami pasang-surut. Baik PPP di Indonesia maupun PAS di Malaysia telah mengalami fase panjang dalam sejarah kepartaian masing-masing. Dalam perjalannya, kedua negara terus berhadapan dengan partai-partai nasionalis yang tidak secara tegas mengusung Islam sebagai visi perjuangannya. Namun demikian, kedua partai belum pernah mengalami kondisi puncak. Di sinilah titik letak perjuangan kedua partai ini. Kedua partai dipilih berdasarkan asumsi bahwa keduanya berada di negara di mana populasi Muslim sangat besar, namun justru mengalami berbagai kendala, termasuk ketertarikan publik Islam terhadap keduanya. Data yang dianalisis dalam tulisan ini diperoleh dari berbagai literatur yang telah dihasilkan oleh para ahli terdahulu. Tulisan ini mendiskusikan dua hal, (1)demokratisasi dan politik kepartaian, dan (2) Demokratisasi dan Partai Politik Islam. Hal yang pertama menyangkut bagaimana proses demokrasi berpengaruh terhadap sistem kepartaian Islam. Hal kedua berhubungan erat dengan relevansi sistem demokrasi dengan partai-partai Islam. Kedua topic ini akan diuraikan secara singkat pada sub diskusi tulisan ini. Dengan demikian, sumber utama data adalah literatur-leteratur yang memiliki relevansi dengan tema tulisan ini.

## **B. DEMOKRATISASI DAN POLITIK KEPARTAIAN ISLAM**

Politik kepartaian pada dasarnya lahir dari sistem demokrasi sebagai proyek modernisasi politik yang sama-sama melanda Indonesia dan Malaysia. Lahirnya partai Islam Se-Malaysia (PAS) menjadi sebuah tuntutan sebagai sarana perjuangan dalam meraih sebuah kemerdekaan dengan mengambil isu sebuah gerakan politik Islam dengan cita-cita akan lahirnya negara Islam Malaysia. Dalam sebuah perjuangannya, PAS sedikitnya sudah mengalami tiga kali pembaharuan ideologi politiknya. Pada awal PAS didirikan mengedepankan sikap nasionalisme, kemudian mengalami perubahan menjadi fundamentalisme dan pada era 90-an PAS berubah menjadi liberalisme. Perubahan semangat kepartaian PAS ini sangat dipengaruhi oleh kondisi politik tanah air Malaysia dan mitra koalisinya. Sebagaimana digagas Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib dan Wan Fariza Alyati Zakaria dalam *International Journal Thought* Vol. 8/ 2015 bahwadalam sejarah perjalanan politik PAS, kini sudah mengalami perubahan. Semula PAS merupakan partai eksklusif, kemudian menjadi partai



inklusif dengan mengusung slogan “PAS For All”. Perubahan politik PAS ini tidak terlepas dari pengaruh mitra koalisi dalam membangun kebersamaan politik di Malaysia.

Masa-masa sulit seperti itu juga pernah dialami oleh umat Islam Indonesia sejak Indonesia merdeka dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Perjuangan yang melelahkan tersebut berakhir dengan sebuah kenyataan politik yang pahit bagi umat Islam, dimana perjuangan untuk penerapan syariat Islam sebagai landasan dalam tata kelola negara Indonesia terkalahkan dengan paham nasionalis. Akibatnya, Piagam Jakarta ditolak sebagai muqaddimah UUD 1945. Fakta politik ini merupakan kekalahan pertama umat Islam dalam pentas politik nasional Indonesia yang kemudian diikuti oleh kekalahan yang lain. Kebijakan pemerintah yang mempersempit gerak politik umat Islam dengan keharusan partai-partai Islam berfusi dalam satu partai PPP merupakan pukulan telak dari pemerintah kepada umat Islam berikutnya. Bukan itu saja, dicitrakannya partai politik Islam menjadi partai yang tidak menarik, partai Islam terus mengalami gejolak internal, dan akhirnya adanya pengembosan pada PPP, sehinggaberakibat merosotnya perolehan suara PPP (Sanusi, 1998:106-107).

Eksistensi perjuangan politik umat Islam melalui partai PAS dalam konteks Malaysia dan PPP dalam konteks Indonesia, memang harus disadari partai Islam tidak mampu menyelesaikan persoalan dan tuntutan umat Islam yang kian kompleks permasalahannya. Namun demikian, melahirkan gerakan politik Islam untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, merupakan sebuah kewajiban. Abdul Munir Mulkhan (1999:158-159) menulis ada sumber ideologis yang menyuplai gagasan gerakan Islam ini. **Pertama**, adanya kepercayaan aturan syariat Islam sudah lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan. **Kedua**, kehidupan duniawai yang profan termasuk politik, harus merupakan penerapan hukum Tuhan dalam Al-Qur'an yang secara lengkap tersusun di dalam syariat. **Ketiga**, gerakan pembaharuan Islam lebih berorientasi kepada syariat, sehingga berpeluang lahirnya fundamentalisme. **Keempat**, adanya pandangan bahwa seluruh pemikiran ulama sebagai hal baku yang berlaku universal dan tidak berubah sehingga menjadi dogma. **Kelima**, elit gerakan Islam menempatkan ahli syariah memegang otoritas tunggal menafsirkan ajaran Islam. **Keenam**, munculnya beban psikologis akan adanya ancaman dari agama lain, tradisi dan kekuatan sekuler. Ketika ancaman tersebut, masih terus menerus menghantui umat Islam, maka gerakan Islam dan politik Islam akan terus muncul ke permukaan.

Ketika kondisi sosial dan politik umat Islam belum menampakkan sebuah kemapanan dan terpaan isu miring yang mengancam umat Islam, sudah tentu keberadaan perjuangan politik melalui partai politik Islam akan terus-menerus berlangsung. Ideologisasi Islam masih menjadi segmentasi yang menarik bagi umat Islam, meski pun dukungan terhadap partai Islam ini tidak bisa mencapai titik mayoritasnya. Dengan memperhatikan eksistensi berbagai gejala politik dan isu politik berazaskan agama ini, maka keberadaan partai PPP di Indonesia dan PAS di Malaysia akan masih dibutuhkan oleh masyarakat muslim, sebagai partai yang mengawal ditegakkannya substansi syariat Islam menjadi landasan kebijakan publik yang tidak merugikan umat Islam. Langkah ini tentu tidak melanggar dari prinsip-prinsip demokrasi, bahkan menjadi sebuah keharusan, karena faktanya Indonesia dan Malaysia ini memiliki

penduduk mayoritas muslim dan sudah menjadi kewajaran kalau norma-norma Islam dipertimbangkan dalam tata kelola negara.

Pelembagaan Islam dalam kancah negara menjadi sebuah tuntutan, minimal adalah lahirnya sebuah kebijakan yang melindungi Islam sebagai agama dan umat Islam sebagai pemeluknya. Semangat ini sama-sama dimiliki Indonesia dan Malaysia, perhatian besar negara terhadap agama Islam dan umat Islam sampai-sampai menjadi titik kekhawatiran bagi laju demokratisasi. Namun demikian, kebenaran kebangkitan Islam akan menjadi ancaman dan sekaligus akan menghambat demokratisasi, memang harus dibuktikan sampai ke wilayah empiris. Karena tidak banyak bukti yang bisa menemukan benang merahnya antara kebangkitan Islam dan mandegnya demokrasi di Indonesia dan Malaysia. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, demokrasi di kedua negara tersebut justru mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dan mapan dalam pelembagaan demokrasi seiring dengan bangkitan sistem kepartaian Islam.

Lahirnya undang-undang Malaysia yang menempatkan Islam sebagai agama negara dan konstitusi yang melindungi etnis melayu yang juga beragama Islam merupakan salah satu contoh betapa pentingnya sinergisitas Islam dan politik kepartaian dalam proses demokratisasi. Pemberian hak istimewa dan proteksi muslim Melayu, memang banyak menyita perhatian para pemerhati dari luar Malaysia. Bahkan kebangkitan Islam Malaysia ini juga membuat waswas bagi elit politik non Melayu. Sebagaimana ditulis Fred R. von der Mehden (1985: 335) dalam karyanya yang berjudul "Kebangkitan Kembali Islam Di Malaysia", bahwa kenyataan memang konstitusi Malaysia menjadikan Islam adalah agama negara, dan hukum Islam untuk mengatur tingkah laku pemeluknya. Konstitusi juga mengatur golongan agama lain diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Namun dalam realitasnya, para misionaris mengalami kesulitan bergerak karena adanya larangan mengajak orang Islam pindah agama. Kebangkitan Islam telah membuat khawatir bagi non melayu atas munculnya ketidaktoleransian yang semakin besar dalam masyarakat Islam. Para wakil penduduk Cina dan India khawatir kebangkitan Islam ini akan menjadikan partai Melayu semakin tinggi memberikan dukungan kepada fundamentalisme agama. Dua partai yaitu UMNO dan PAS partai yang paling disorot.

Kekhawatiran kebangkitan Islam akan menghambat proses demokratisasi pernah terjadi juga di Indonesia. Kebangkitan kaum intelektual muslim masuk di pusaran kekuasaan, pendidikan dan ekonomi pada era 90-an, menjadi fakta sejarah monumental bagi kebangkitan umat Islam ini tidak terbukti menjadi titik hambat bagi pelaksanaan proses demokratisasi di Indonesia. Bahkan kecenderungannya justru hadirnya intelektual muslim tersebut yang kini menduduki posisi penting di birokrasi dan politik dapat mendorong laju demokratisasi di Indonesia. Dalam politik Indonesia, ada dua organisasi keagamaan Islam yang sangat strategis dalam mendorong demokratisasi yaitu Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Namun demikian, kedua organisasi tersebut tidak secara eksplisit menyatakan diri bergabung dalam satu partai politik meskipun mamiliki basis massa yang kuat. Bahkan, Muhammadiyah dengan tegas menyatakan diri berada di luar partai politik dan tidak akan berpolitik praktis (Nashir, Qodir, Nurmandi, Jubba, & Hidayati, 2019).



Sikap khawatir banyak pihak atas kebangkitan Islam ketika disandingkan dengan demokrasi tersebut, tentu tidak lepas dari perspektif miring peradaban barat terhadap Islam yang ada selama ini. Islam yang diidentikkan dengan kekerasan, terorisme dan label negatif lainnya, tentunya menjadi problem yang harus dijawab oleh umat Islam. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian lebih lanjut, pada pembahasan ini perlu ada batasan tentang batasan partai politik dan partai politik Islam, agar dalam melakukan kajian Islam dan Demokrasi ini tidak mengalami bias makna, ketika menempatkan PPP dan PAS menjadi unit analisis demokratisasi dalam sistem kepartaian. Ketika menghadirkan PPP dan PAS dalam kajian Islam dan demokrasi, maka yang terbayang dalam pikiran kita tentu berkaitan dengan kebangkitan Islam, karena pelebagaan kepartaian PPP dan PAS sarat dengan semangat dan perjuangan Islam. Bicara soal partai politik Islam, tentu tidak bisa lepas dari paduan kata partai politik secara umum yang sudah melegenda sejak jaman Yunani kuno hingga abad moderen sekarang ini, yang mana istilah partai politik ini memiliki akar pemahaman berkaitan dengan perilaku warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, mencari dan mempertahankan kekuasaan, untuk perumusan kebijakan umum, dan berkaitan dengan konflik untuk mempertahankan sumber yang dianggap penting (Surbakti, 1992: 2).

### **C. DEMOKRATISASI DAN PARTAI POLITIK ISLAM**

Demokratisasi dalam konteks kepartaian politik Islam, sudah sangat jelas bahwa kata Islam memiliki pemahaman pada tingkat institusi dan substansi, sehingga partai politik Islam dalam operasionalnya tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam sebagai sumber kebenaran. Oleh karena itu, politik Islam mengharuskan adanya akhlak dan tuntunan nilai-nilai Islam, baik dalam ranah konseptual maupun operasional pada pelebagaan partai politik. Dengan demikian, tingkat progresifitas dan implementasi nilai-nilai Islam menjadi ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi, sehingga sebuah partai politik Islam posisinya berada di garda depan dalam membela kepentingan umat Islam. Misi utama partai politik Islam tersebut baik secara kelembagaan maupun kerja politik keumatan, dapat dikatakan masih berada dalam koridor demokrasi.

Hadirnya partai-partai Islam di Indonesia pasca reformasi menjadikan trauma tersendiri bagi Kuntowijoyo. Intelektual muslim dan budayawan ini justru menyatakan ketidak-setujuannya ketika masing-masing elit masyarakat sibuk mendirikan partai politik Islam. Ada enam alasan keengganannya terhadap partai Islam, karena kehadiran partai Islam dipahami sebagai terhentinya mobilitas sosial kaum santri, disintegrasi umat, menjadi penyebab memiopia (orientasi kekinian), membuka pemiskinan umat, runtuhnya proliferasi, alienasi generasi muda. Dengan adanya titik lemah tersebut, maka mendirikan partai politik Islam dinilainya sebuah kesalahan fatal (Kuntowijoyo, 1998: 192-195).

Bertolak belakang dengan pemikiran Kuntowijoyo, dalam konteks Indonesia para elit muslim justru mengerangkai pemikirannya bahwa hadirnya pelebagaan politik Islam ini merupakan panggilan sebagai sarana menjaga

agar umat Islam tidak dipinggirkan oleh penguasa yang tidak memiliki *basic* keagamaan Islam yang kuat. Hadirnya partai politik “Islam” pasca reformasi sebut saja nama Amin Rais dengan PAN, Gus Dur dengan PKB, Yusril Ihza Mahendra dengan PBB dan sejumlah partai yang memiliki basis dukungan dari umat Islam adalah fakta akan pentingnya partai politik Islam dalam sistem politik kepartaian. Sementara di Malaysia, munculnya persaingan politik UMNO dan PAS dalam membuat gagasan syariat Islam oleh PAS, dan gagasan Islam Hadhari oleh UMNO menandai betapa pentingnya politik Islam. Seiring dengan kemajuan ekonomi yang dicapai, Malaysia juga semakin diperhitungkan dalam panggung politik internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, bahwa sejak awal berdirinya hingga saat ini persaingan sengit keduanya telah mendominasi politik Malaysia, terutama dalam memperebutkan massa Melayu dengan isu keislaman (Daulay, 2013:147).

Pergeseran politik Islam di Malaysia memang cukup menarik, khususnya pada fenomena politik yang dilakukan oleh PAS yang bersaing keras dengan UMNO sebagai partai penguasa yang berbasis etnis Melayu dan Islam. Pada awalnya UMNO dikenal sebagai partai sekuler yang didukung oleh elite partai yang berlatar belakang pendidikan Barat. Dalam perkembangan berikutnya, UMNO bergeser menjadi partai yang banyak membuat kebijakan politik yang cenderung menguntungkan etnis Melayu dan umat Islam. Pergeseran politik UMNO yang semakin banyak menguntungkan umat Islam dan etnis Melayu terjadi pada masa pemerintahan Mahathir Mohammad. Ketika lingkungan politik dan sosial telah berubah, akibat gelombang urbanisasi orang-orang Melayu ke wilayah perkotaan, tekanan yang semakin besar pada bangsa dan agama Melayu (Islam), aktivitas dan tuntutan politik kepada PAS pun ikut berubah. Para politisi, sebagian karena keyakinannya, dan sebagian lagi karena tuntutan pragmatis, semakin mengikatkan diri mereka pada warisan Melayu-Muslim. Konsistensi sebagai partai oposisi dan tetap mengusung negara Islam dan menjadi partai terbuka, menjadikan PAS makin kuat mendapat dukungan dari umat Islam, terutama setelah kaum terdidik Melayu memperkuat garis perjuangan PAS.

Dengan paparan kontribusi partai Islam PAS dalam tata kelola pemerintahan di Malaysia lebih memilih menjadi oposisi untuk melahirkan kontrol, semakin memperkuat argumentasi betapa pentingnya partai Islam dalam proses demokratisasi. Ismail Suardi Wekke (2013) dalam “Islam Politik di Malaysia” bahwa implementasi Islam sebagai roh dari pemerintah dalam mewujudkan impian mereka sebagai bangsa sangat mendorong sebuah demokrasi. Agama dalam konteks negara dilihat sebagai budaya yang memiliki fungsi profetik. Kebijakan pemerintahan dikelola dengan tujuan-tujuan transenden. Termasuk pada urusan mempertahankan loyalitas rakyat. Memahami perkara negara dalam perspektif politik Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Walaupun susah dalam memahami hal tersebut, selalu saja menarik dalam melihat hubungan antara agama dan perilaku politik yang berujung pada demokrasi. Dengan demikian, agama yang menjadi pegangan individu dalam komunitas merupakan salah satu prinsip yang menjadi acuan. Agama harus wujud dalam bentuk manfaat kemanusiaan dalam arti yang luas. Tidak sebatas ritual saja tetapi harus juga melembaga di luar aktivitas penyembahan. Karena apapun yang dilakukan dalam prosesi ritual yang ada itu semata-mata untuk kebutuhan manusia.





Bangunan relasi antara Islam dan politik menemukan bentuk yang tidak tunggal. Dalam sejarah peradaban Islam telah dipraktikkan berbagai model yang kesemuanya dapat dikatakan sebagai bentuk dari penjiwaan terhadap nilai-nilai keislaman. Agama telah memberikan pemaknaan terhadap fakta sosial. Demikian pula dalam konteks universal, agama juga menjadi spirit bagi keberlangsungan demokrasi. Sehingga masing-masing umat beragama memaknai iman dalam kehidupan sehari-hari dengan keberagaman. Pemaknaan demokrasi dan demokratisasi ini kemudian berkembang menurut pandangan nasional masing-masing. Bahkan kemudian pembentukan negara-bangsa dipicu dengan pandangan adanya ikatan kesamaan kultural berdasarkan aspek kebangsaan. Justru dengan nasionalisme yang mengambil bentuk emosional dan kadang ekstrim menimbulkan perselisihan tersendiri. Sebagaimana pertentangan Pan-Malayan Islamic Party (PMIP) menentang United Malays Nationalist Organization (UMNO) secara sengit.

Tuduhan yang dilancarkan adalah bagaimana partai yang berkuasa justru tidak menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan. Justru yang terlihat adalah dominasi politik. Tetapi Islam yang didengungkan hanya sebatas slogan. Nasionalisme menunjukkan bahwa setiap institusi keuangan di Malaysia sudah mengintegrasikan Dewan Syariah ke dalam struktur lembaga. Kemudian dilengkapi juga dengan adanya unit yang khusus menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan pelaksanaan manajemen, termasuk dalam pelaporan, tanggung jawab dan keterbukaan. Partisipasi politik Islam di Malaysia bisa bersinergi dengan kekuasaan kerajaan, keberhasilan pemerintahan dapat mengelola kelas sosial yang ada tentu merupakan faktor penting. Nilai dan persepsi interpersonal tidak lagi menjadi kendala dengan penetapan Islam sebagai agama resmi. Walau pun sikap interpersonal ini adalah pandangan politik, tetapi eksistensi yang diterjemahkan dalam urusan politik tidak mendorong untuk membuat kelompok dengan nilai berbeda. Sebab sejak awal nilai yang dianut merupakan prinsip yang sama dengan apa yang diyakini kelompok lain, sehingga masyarakat menjadi lebih percaya diri.

Dengan tumbuhnya kepercayaan diri ini, maka dapat mendorong partisipasi yang selanjutnya akan terbentuk partisipasi aktif, kepuasan dalam bernegara, serta menjadi warga negara yang setia. Pada gilirannya akan mendorong terwujudnya hubungan sosial dan kerja sama diantara warga negara. Hal ini kemudian berhasil mengeliminasi wujudnya perbedaan-perbedaan ideologi yang menjadi wacana. Ada transformasi dan juga penyesuaian akan ide demokratisasi. Ketika demokratisasi berjalan dan berkembang di negara bukan asal demokrasi, maka ada adaptasi dan ada akulturasi dengan budaya yang sebelumnya sudah ada. Prinsip pemerintahan berjalan sesuai dengan norma dan keyakinan yang dimiliki masing-masing negara. Demikian di Malaysia, dimana Islam sudah menemukan tempat ketika demokrasi belum memberikan ide dalam kelangsungan pemerintahan. Oleh karena itulah tata kelola pemerintahan Malaysia politik agama dapat berjalan seiring. Prinsip-prinsip Islam kemudian menjadi inspirasi dalam penetapan kebijakan.

Malaysia sebagai negara Islam sudah berusaha mengadaptasi Islam untuk menjadi standar etis dalam kenegaraan. Agama dijadikan sebagai alat untuk melakukan transformasi di masyarakat. Namun demikian agama lain dalam konteks ini diberikan kebebasan tetap mempraktikkannya dalam sebuah

kehidupan keseharian. Islam menjadi kesadaran kolektif masyarakat, sehingga keberadaan partai Islam PAS bisa menjadi lokomotif proses demokrasi. Begitu pula dengan keberadaan PPP sebagai partai politik Islam di Indonesia. Sejak awal partai ini berfusi menjadikan Islam sebagai azas dalam berpartai. Meski PPP memakai azas Islam, keberadaan PPP tidak pernah keluar dari koridor demokrasi bahkan selalu menyokong terhadap demokratisasi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan digariskannya prinsip perjuangan PPP dalam anggaran dasar partai. Prinsip tersebut meliputi; prinsip ibadah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan dan prinsip istiqamah. Dalam bidang politik PPP mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat sejati dengan prinsip musyawarah. PPP sangat menentang bentuk-bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni dan kesewenang-wenangan yang mendholimi rakyat (Ketetapan Muktamar VII PPP, 2011: 3-4).

Dengan paparan adanya prinsip dasar yang menjadi pijakan partai dalam memainkan peran politiknya, maka kehadiran PPP dalam perpolitikan di Indonesia jelas menjadi partai yang memberi kontribusi dalam proses demokratisasi. Cerminan internal dapat dibaca dalam distribusi elit yang dikelola dalam permusyawaratan lewat muktamar. Pada level eksternal keterlibatan PPP dalam berbagai permusyawaratan dalam pengambilan kebijakan menjadi fakta penting. Belum lagi secara kelembagaan politik, dimana setiap lembaga politik pada tata kelola negara menjadi prasyarat bagi pelaksanaan demokrasi baik substansi maupun prosedural. Oleh karena itulah, dalam berpolitik PPP sebagai partai politik Islam dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib rakyat selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bahkan dalam muktamar ke VII jelas-jelas PPP merekomendasikan kepada pemerintah perlunya dilanjutkan reformasi politik, kesungguhan dalam demokratisasi dan institusionalisasi nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan kultur, karakter dan dinamika masyarakat Indonesia.

Paparan fakta politik yang ada pada partai Islam PPP di Indonesia dan PAS di Malaysia di atas, semakin memperkuat argumentasi bahwa keberadaan partai politik Islam sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi, dan bahkan partai PPP dan PAS sama-sama berkontribusi dalam proses demokratisasi. Tuntutan sistem kepartaian yang dalam pemerintahan negara menjadi sangat bermakna pada kehidupan demokrasi, maka bagi Malaysia dan Indonesia, sistem kepartaian Islam ini adalah satu pengalaman bagi umat Islam untuk menuju sebuah pemerintahan yang demokratis. Penerimaan demokrasi Barat secara bertahap dalam tata kelola pemerintahan yang memberi ruang penyertaan rakyat dalam menentukan kebijakan. Peningkaran dan kritik tajam atas demokrasi liberal oleh PPP dan PAS, merupakan sisi kritis dan bukti kedaulatan dari partai politik Islam. Sikap politik ini tidak bisa dijadikan rujukan bahwa partai politik Islam menjadi partai yang anti demokrasi. Pada dataran realitasnya yang terjadi justru sebaliknya, sikap kritis tersebut menunjukkan ada transformasi dan penyesuaian terhadap demokratisasi.



## D. KESIMPULAN

Ketika demokrasi berjalan dan berkembang, partai-partai politik Islam merespon dengan baik, menunjukkan dalam proses politik ada adaptasi dan akulturasi dengan budaya. Keberlangsungan prinsip pemerintahan yang berjalan sesuai dengan norma dan keyakinan masing-masing negara, termasuk di Indonesia dan di Malaysia menandakan kebaikan demokrasi ke depan. Ketika demokrasi dan relasi negara dengan agama mulai menjadi wacana dan sudah pada tahap pelembagaan, maka gejala ini menandakan sesungguhnya pelaksanaan pemerintahan dalam Islam menunjukkan fleksibelitasnya, sehingga partai-partai Islam secara mandiri mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan kemanusiaan dan demokrasi. Islam sebagai ajaran Tuhan dalam konteks ini lebih menjadi inspirasi dalam penetapan kebijakan. Sistem pemerintahan demokratis yang disepakati berusaha diadaptasi oleh setiap warga negara. Sementara bagi Indonesia meski bukan sebagai negara Islam, ajaran Islam menjadi pertimbangan etis oleh partai Islam dalam menentukan kebijakan. Dalam konteks Malaysia Islam tidak lagi menjadi wacana, tapi justru Islam dijadikan sebagai alat menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Putusan politik dengan memilih Islam sebagai acuan utama dan menjadikan agama lain secara bebas tetap dapat dipraktikkan di Malaysia, menunjukkan bahwa Islam sudah menjadi sebuah kesadaran kolektif masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hasan, Sahar L. (1998). Memilih Partai Islam Visi, Misi dan Persepsi. *Jakarta: Gema Insani*.
- Sanusi, Anwar. (1998). Penggunaan Hak Pilih Umat dalam Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi. *Jakarta: Gema Insani*.
- Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. *Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia*.
- von der Mehden, Fred R. (1985). Kebangkitan Kembali Islam Di Malaysia.
- Widodo, Gatot Priyo, dkk. (2015). Komunikasi Politik dan Resolusi Konflik di Malaysia dan Indonesia Pada Organisasi Politik. *Yogyakarta: Andi Press*.

### Jurnal dan lainnya

- Badri, Z. H. (2019). Alternatif Bagi Penguatan Demokrasi: Pengalaman Mekanisme Anggaran Partisipatif (Participatory Budgeting) Di Kota Porto Alegre, Brazil. *Review of International Relations, Volume 1*.
- Bezhan, F. (2017). Nationalism, Not Islam: The "Awaken Youth" Party and Pashtun Nationalism. In Green N. (Ed.). *Afghanistan's Islam: From Conversion to the Taliban (pp. 163-186)*. Oakland, California: University of California Press. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1kc6k3q.14>.
- Cora, Elly Noviaty. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Konstitusi*.

- Daulay, Hamdan. (2013). Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia: dari Wacana Syariat Islam hingga Konsep Islam Hadhari. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47 (1).
- Hadiz, V. R. (2011). No Turkish Delight: The Impasse of Islamic Party Politics in Indonesia. *Indonesia*, (92), 1. doi:10.5728/indonesia.92.0001.
- Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan tentang AD dan ART PPP, (2011). *Jakarta: DPP PPP*.
- Mayrudin, Y. M., & M. Chairil Akbar. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11 (2). 169–186.
- Mulkhan, Abdul Munir. (1999). Akar Fundamentalisme dalam Gerakan Islam di Indonesia dalam Wacana Proyek-Proyek Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, 2 (1).
- Mutalib, Muhammad Faiz Mukmin Abdul, et.al. (2015). Post-Islamism in PAS: An Analysis on the Impact of Tahalluf Siyasi. *International Journal of Islamic Thought*, 8 (2), 52-60.
- Nashir, H., Qodir, Z., Nurmandi, A., Jubba, H., & Hidayati, M. (2019). Muhammadiyah's "Moderation Stance in the 2019 General Election: Critical Views from Within". *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.1-24>.
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1 (1), <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.
- Tanjung, A. (2019). Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal (Studi Partai Politik Islam di Kabupaten Bone). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.360>.
- Wekke, Ismail Suardi. (2013). Islam Politik di Malaysia. *Millah Jurnal Studi Agama*, 7 (2).

